



Strategi Milenial Terhadap Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Millennial Strategy Against Whites (Golput) in the 2024 Regional Head Elections

Gerald Elisa Munthe¹⁾, Mhd. Ansor Lubis²⁾* & Muslim Harahap³⁾

1) Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

3) Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Harapan Medan, Indonesia

Abstrak

Generasi muda bukan hanya calon pemimpin masa depan, tapi juga pemilih terbesar pada pemilu 2024. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk meningkatkan partisipasi generasi milenial pada pemilu 2024, yakni meminimalkan frekuensi memilih terhadap golongan putih (golput). Tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu faktor yang menentukan hasil suatu pemilu. Semakin tinggi jumlah pemilih, semakin tinggi peluang untuk memenangkan pemilu. Pemilih muda telah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemilu dan, pada gilirannya, akan mempengaruhi pembangunan negara. Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya, diperlukan berbagai cara baru dan ide-ide inovatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah hukum preskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penggunaan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Kesimpulan dari artikel ini adalah golput dapat diminimalisir dengan beberapa cara. Salah satunya adalah peran KPU untuk memperbaiki berbagai hal selama pemilu seperti: Peningkatan sosialisasi dan sarana dan prasarana pemungutan suara.

Kata Kunci: Milenial; *Golput*; Kepala Daerah

Abstract

The younger generation is not only the future leaders, but also the largest voters in the 2024 elections. The purpose of writing this article is to increase the participation of the millennial generation in the 2024 elections, namely by minimizing the frequency of voting for the white group (golput). The level of voter participation is one of the factors that determine the outcome of an election. The higher the voter turnout, the higher the chance of winning an election. Young voters have had a significant influence on election results and, in turn, will affect the development of the country. To obtain as many votes as possible, new ways and innovative ideas are needed to increase voter participation. The method used in this article is prescriptive law, using data collection techniques through library research and the use of secondary sources such as books, journals, and other legal materials. This article concludes that abstention can be minimized in several ways. One of them is the role of the KPU to improve various things during elections such as: Increased socialization and voting facilities and infrastructure.

Keywords: Millennial; *Golput*; Regional Head

How to Cite: Munthe, E.G., Lubis, M.A., & Harahap, M., (2024). Strategi Milenial Terhadap Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(1) 2024: 166-174,



PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana utama demokrasi yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan yang adil. Namun, fenomena golongan putih-juga dikenal sebagai golput-telah menjadi perhatian utama di banyak negara, termasuk di Indonesia, selama beberapa pemilu terakhir. Pemilih yang tidak menggunakan hak suara mereka pada hari pemilu disebut Golput. Dalam hal pemilihan 2024, masyarakat harus memahami konsekuensi negatif dari tidak hadir dan mengambil tindakan untuk menghindarinya.

Partisipasi aktif dalam Pemilu 2024 sangat penting karena ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka dan memberikan suara mereka untuk menentukan jalan kebijakan publik. Melalui partisipasi, generasi muda memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada proses pembentukan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, mengambil bagian dalam pemilu memberikan kesempatan untuk mengatasi ketimpangan dan menciptakan keadilan sosial. Dalam demokrasi, setiap warga memiliki hak suara yang sama dan peluang yang sama untuk membela hak-haknya dan memengaruhi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka (Burhani et al., 2019; Samidi & Suharno, 2018).

Berdasarkan hal tersebut partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator dari pelaksanaan legitimasi tertinggi kekuasaan negara oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang terwujud dalam partisipasi dalam pesta demokrasi (pemilu). Dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu sarana demokrasi dan wujud perwujudan kedaulatan rakyat, untuk menghasilkan wakil dan pemimpin yang ambisius, kompeten dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diikuti dan dipelajari lebih lanjut adalah pemilih pemula. Pemilih baru adalah pemilih yang baru pertama kali memberikan suaranya dalam suatu pemilihan (Fathurokhman, 2022).

Pemilih pemula dalam pemilihan umum merupakan pemilih generasi baru dengan karakteristik, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kebanyakan dari mereka adalah pelajar, memiliki situasi keuangan yang baik dan sebagian besar tinggal di dalam atau di sekitar kota. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang baik pada kelompok ini, mereka menggunakan alat-alat teknis yang rumit dari telepon seluler, laptop, tablet, dan banyak perangkat lainnya. Mereka juga sangat bagus di media sosial dan jaringan seperti *Twitter*, *Facebook*, *LinkedIn* (Nur Wardhani, 2018).

Pemilih pemula menghadapi tantangan yang sangat berat, mulai dari perubahan politik dan permasalahan internal tanpa arah yang jelas, hingga tekanan globalisasi, perdagangan bebas, terorisme, intervensi internasional, dll. Perbedaan sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang dihadapi pemilih muda dalam pemilihan umum harus dipahami dengan baik, terutama dalam rangka mempersiapkan pemilih muda yang cerdas, kritis dan progresif. Seiring dengan fakta bahwa para pemilih pemula ini akan menjadi pemimpin selanjutnya pada peringatan 100 tahun Republik Indonesia tahun 2045. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap eksis saat ini dan akan sangat ditentukan dalam pemilihan pemilih muda (Jesica et al., 2020).

Pengaruh penting dan signifikan pemilih muda terhadap pemilu tercermin dari partai peserta pemilu dan calonnya. Padahal, perburuan pemilih muda sudah dimulai dalam dua tahun pemilu terakhir, artinya sudah banyak yang mulai mempertimbangkan suara pemilih muda dalam kampanye, sehingga hal ini tidak jarang terjadi. Untuk mengumpulkan suara para pemilih muda ini dengan berbagai cara. Pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih muda dan pemula patut mendapat perhatian khusus. Pendidikan politik yang buruk membuat kelompok ini rentan terhadap mobilisasi kepentingan khusus (Harahap et al., 2019; Harris, 2014; Kusmanto, 2013). Misalnya, berdasarkan pengalaman masa lalu, para pemilih muda ini sering terbuai dengan pasangan calon oleh konten atau jargon tertentu, baik melalui perang iklan atau media sosial, tanpa memiliki pemahaman yang mendalam tentang mengapa mereka harus memilih pasangan calon tersebut.

Dengan menggunakan hak suara mereka, warga dapat memperjuangkan masalah penting bagi komunitas mereka dan mendukung keadilan sosial secara keseluruhan. Pendidikan politik, kampanye sosial, dan peningkatan kesadaran publik harus ditingkatkan untuk mencegah golput dalam Pemilu 2024. Pemerintah, lembaga sosial, media massa, dan LSM harus bekerja sama untuk memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh tentang pentingnya pemilu serta konsekuensi dari golput (Iswardhana et al., 2023).

Pemilihan umum atau sering disebut dengan pemilu merupakan salah satu cara yang sangat penting guna menjaga kedaulatan, karena pemilu ini memusatkan atau menitik beratkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan primer. Saat ini Indonesia sendiri telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 5 kali guna memilih calon legislatif dan 4 kali pemilihan presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019 (Noor Maulandari, H.M. Uhaib As'ad, 2020).

Dalam diselenggarakannya pemilihan umum terdapat jargon yang selalu di sebut-sebut setiap pelaksanaan, sering dikenal dengan *luber jurdil*. *Luber Jurdil* adalah pemilihan umum dengan cara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal seperti ini belum bisa terwujud dengan baik namun bisa diwujudkan jika penyelenggara pemilu memiliki integritas, profesionalisme dan akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum (Silalahi, 2022).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula merupakan warga atau masyarakat yang didaftarkan oleh penyelenggara pemilihan umum sebagai daftar pemilih, dan dapat mengikuti serta memberikan suara pertama kali pada saat berusia 17-21 tahun. Pemilih pemula dalam kegiatan politik/pemilihan umum masih memerlukan bimbingan atau binaan agar mereka memiliki pengetahuan dalam bidang politik. Partisipasi pemilih pemula mampu merubah masa depan bangsa, sebagai generasi muda yang menjadi masa depan bangsa pemilih pemula diharapkan agar tidak golput atau tidak memberikan suara (tidak berpartisipasi). (Iswanto & Pamungkas, 2023) Sebagai pemilih pemula haruslah memahami makna dan arti dari demokrasi pada sebuah negara serta memahami bagaimana cara mencapai tujuan demokrasi tersebut. Persoalan yang sampai saat ini masih menjadi PR bagi pemerintah terkait pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah ialah rendahnya partisipasi politik pemilih tetap maupun pemilih pemula.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengajak generasi muda berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Generasi Milenial saat ini atau yang kerap disapa dengan sebutan generasi Z ini adalah anak muda yang hidup pada kisaran tahun 2000an. Generasi Milenial saat ini sedang mengalami perkembangan yang memasuki fase remaja dan dewasa awal. Generasi Milenial atau akrab di sebut dengan generasi Z ini tumbuh seiring berjalannya dengan perkembangan internet yang semakin maju saat ini setelah menjamahnya internet (Cahyani, 2019).

Pemilih muda (generasi Z dan milenial) kerap kali menjadi fokus para pihak saat menjelang pemilu. Mungkin karena proporsi pemilih muda (berusia 17-39 tahun) diprediksi mendekati 60 persen dan berpotensi menjadi penentu kemenangan pada kontestasi politik di 2024. Bahkan, angka tersebut sering dikaitkan sebagai asal muasal masa depan demokrasi Indonesia akan membaik. Pada Pemilu 2024 nanti, jumlah pemilih di Indonesia diperkirakan mencapai 187 juta orang. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), kelompok muda terutama generasi milenial dan Gen Z akan menjadi pemilih terbesar pada Pemilu tersebut. Generasi milenial dan Gen Z juga dianggap sangat penting bagi hasil Pemilu karena mereka dikenal aktif di media sosial dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan politik. KPU mencatat bahwa generasi milenial dan Gen Z cenderung tidak apolitis, melainkan lebih sadar terhadap isu sosial dan politik yang ada di Indonesia.

Mayoritas generasi milenial dan Gen Z memiliki minat terhadap kegiatan politik dan cenderung aktif terlibat dalam kegiatan sosial. Meski cenderung aktif, namun KPU juga menyadari bahwa masih banyak generasi milenial dan Gen Z yang belum memiliki hak pilih karena belum memenuhi syarat umur. Oleh karena itu, KPU menargetkan untuk terus mengkampanyekan pentingnya partisipasi politik dan hak memilih kepada generasi muda.

Hal ini sejalan dengan program yang dijalankan KPU, yaitu Program Pemilih Pemula yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda dan memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya hak suara. Tidak hanya generasi muda, KPU juga menganggap penting peran pemilih perempuan dalam Pemilu 2024. Berdasarkan data dari KPU, jumlah pemilih perempuan di Indonesia mencapai lebih dari 96 juta orang atau sekitar 51 persen dari total jumlah pemilih (Fadilah et al., 2024).

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik generasi muda dan pemilih perempuan, KPU mengajak semua pihak untuk terus mendorong dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan hak memilih. Dengan begitu, diharapkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 akan semakin tinggi dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk Indonesia.

Mengacu pada pemilihan umum di tahun 2019 lalu saat itu juga banyak pemilih muda yang baru pertama memilih saat itu mereka dihadapkan untuk memilih lembaga eksekutif dan legislatif secara bersamaan. Saat memilih calon presiden dan wakil presiden para pemilih yang sudah memiliki hak untuk memilih cenderung dapat mengutarakan pilihannya dengan memilih antar calon presiden yang saat itu hanya dua calon saja. Pada pemilihan wakil legislatif untuk daerahnya mereka cenderung sama sekali tidak memilih dan terkesan sembarangan dalam memilih karena saat itu para calon legislatif jarang yang dikenal oleh pemilih muda di tahun 2019 saat itu. Mereka yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada tahun itu memilih untuk golput dalam memilih para wakil legislatif. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah masyarakat yang golput pada 2019 sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02 persen dari total pemilih yang terdaftar.

Ada banyak faktor yang menjadi sebab mereka memilih golput salah satunya kurangnya sosialisasi calon legislatif saat itu. Menurut beberapa sumber golput bukan merupakan hal yang salah jika hanya dilakukan satu atau dua orang saja namun jika semua pemilih memilih untuk golput atau tidak menyumbangkan suaranya dalam memilih calon presiden maupun calon legislatif nantinya akan berpengaruh panjang pada perkembangan negara.

Memilih calon pemimpin itu sangat penting agar dapat mengatur pemerintahan yang ada dengan baik, jika yang menduduki jabatan penting di negara ini hanya orang-orang yang tidak bisa membawa kearah yang lebih baik dan maju hanya karena tidak ikut sertanya para pemilih muda dalam menyumbangkan suaranya. Jika para pemilih muda tidak mau menggunakan hak suaranya dengan baik dikhawatirkan hak suaranya dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal seperti ini harus di minimalisir agar tidak terjadi lagi golput untuk generasi mendatang. Banyak cara agar para pemilih milenial bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik namun harus dimulai dari saat ini juga. Para calon legislatif mungkin lebih bisa memperluas dalam mempromosikan dirinya agar juga dapat dikenal oleh para pemilih milenial saat ini karena jumlah pemilih milenial 2024 bertambah jumlahnya lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para calon legislatif agar dapat terpilih untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan sana.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya partisipasi dalam Pemilu 2024 dan cara mengatasi fenomena golput, khususnya dengan melibatkan generasi muda dan perempuan agar terciptanya pemilihan yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab terhadap mensejahterakan rakyat serta menghindari golput dalam memilih baik presiden, wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat provinsi/kabupaten kota, dewan perwakilan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menemukan dan menganalisis apa yang melatarbelakangi suatu fenomena atau fenomena sosial. Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan hasil dari fenomena yang diteliti, dijabarkan dalam bentuk deskripsi yang menunjukkan peran praktis pemilih pemula dalam meningkatkan partisipasi pemilu pemula. Penelitian ini berfokus pada pentingnya partisipasi dalam Pemilu 2024 dan cara mengatasi fenomena golput, khususnya dengan melibatkan generasi muda dan perempuan agar terciptanya pemilihan yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab terhadap mensejahterakan rakyat pada pemilu dalam pendekatan kualitatif.

Menurut Cereswell (2005) untuk mempelajari masalah sosial dan manusia, peneliti mengumpulkan data di lapangan dan peka terhadap kondisi sosial setempat, menganalisis data induktif dan deduktif, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data sekunder. Merupakan proses analisis yang dilakukan terhadap data yang ada tanpa perlu melakukan wawancara, survei, observasi, dan teknik pengumpulan data tertentu lainnya. Teknik ini merupakan strategi penelitian yang menggunakan data yang ada untuk menemukan masalah baru atau menguji hasil penelitian yang sudah ada. Sumber data dalam penelitian ini yang pertama adalah berasal data hasil penelitian terdahulu, dan kedua, data administratif kelembagaan yang ada pada website KPU, Bawaslu dan instansi lain yang kredibel dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Pemilih Pemula

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi (Sitepu, 2012). Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikutserta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum, sebagai jalan untuk mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam pemilihan. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini akan dapat merasakan keuntungannya, sebaliknya ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target suara-suara yang ingin di capai (Ivan & Prayetno, 2017).

Partisipasi pemilih pemula harus dibangun karena suara generasi muda merupakan bentuk tanggung jawab terhadap proses keberlanjutan kepemimpinan daerah dan nasional. Rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai warga negara dapat mendorong partisipasi pemilih pemula tinggi untuk memberikan hak suara. Suara mereka harus digunakan dengan semurni mungkin, terhindar dari *money politics* yang sudah mewabah dalam pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya. Pemilih pemula dalam katagori politik adalah kelompok pemula yang baru pertamakali menggunakan hak pilihannya, orientasi pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pendidikan politik dan demokrasi kepada segenap masyarakat khususnya pemuda (pemilih pemula) harus segera

dilakukan untuk menekan serendah mungkin ketidak terlibatan pemilih dalam pemilu. Pemilih pemula yang terdaftar atas pelajar mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi sagmen yang sangat unik, sering kali menimbulkan kejutan dan tentunya menjanjikan secara kuantitas, penyebutan kata unik untuk para pemula sebab pemilih pemula sangat antusiasme tinggi, relatif dan rasional, haus akan perubahan dan sayangnya sangat tipis akan kadar polusi pragmatisme. Sangat disayangkan masih banyak pemilih pemula tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan tidak menggunakan hak suaranya, ada beberapa faktor yang membuat pemilih pemula tidak bersuara, salah satunya pemilih pemula sibuk dengan kegiatannya sehari-hari, dimana kuantitas pemilih pemula pada umumnya adalah pelajar dan pekerja, hal demikian yang membuat pemilih pemula mulai apatis terhadap kegiatan yang berbau politik.

Ada beberapa faktor penyebab apatisnya pemuda dalam ikut serta dalam pemilu: (a) Pertama kurangnya pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi; (b) Kedua minimnya sosialisasi baik oleh pemerintah atau tokoh masyarakat kepada pemuda dan masyarakat; (c) Ketiga kurangnya kepercayaan pemuda terhadap tokoh yang akan dipilih dalam pemilu tersebut

Upaya Stakeholder terhadap Golput pada Keikutsertaan Pemilih Milenial Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024

Pemilu serentak akan digelar pada tahun 2024. Indonesia akan menggelar pesta demokrasi membuat antusiasme dikalangan para politisi berlomba-lomba dalam menggaet suara pemilih terutama pemilih muda. Sejumlah survey menunjukkan generasi muda menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan lagi partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2024, maka penyelenggaran Pemilihan Umum, KPU dan Bawaslu, telah melakukan berbagai upaya termasuk bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti kuliah umum. Oleh sebab itu, penyelenggara Pemilu hendaknya harus aktif untuk bekerja sama dalam meningkatkan partisipasi dalam Pemilu.

Pemilih muda antara 17-22 tahun atau bisa juga pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. (Azirah, 2019). Itu artinya pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Dalam rangka mendapatkan perolehan suara yang banyak, diperlukan berbagai cara atau terobosan baru dalam peningkatan partisipasi pemilih.

Masyarakat termasuk pemilih pemuda berhak berpartisipasi dalam Pemilu. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Pemilih terdiri dari pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan, dan/atau warga internet (netizen). Yang dimaksud partisipasi pemilih adalah kegiatan seseorang atau kelompok dalam bidang politik jelang proses Pemilihan Umum. Sedangkan partisipasi politik adalah tindakan seseorang yang bersifat sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi pemilih merupakan tindakan seseorang yang bersifat sukarela. Perlu dukungan dari berbagai pihak dalam peningkatan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih merupakan faktor yang menentukan keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi partisipasi pemilih maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan Pemilu.

Dalam pemilu golput merupakan hal umum yang sering terjadi dalam kehidupan politik. Pembicaraan masalah Golput selalu menjadi topik pemberitaan yang menarik menjelang pemilu di negara mana pun di seluruh dunia. Ia juga menjelaskan bahwa memilih adalah Hak bukan Kewajiban. Hal itu termuat dalam UU tentang Pemilu, yaitu UU No.10 Tahun 2008 pada Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi, "WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau

lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Jadi jelas bahwa itu adalah hak dari setiap orang.” Selain itu, UUD 45 sebagai UU tertinggi Negara Indonesia yang sudah diamandemen pada 1992 dan 2002 mencantumkan dalam pasal 28 E, “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Jadi dua pernyataan di atas menjelaskan bahwa ada kebebasan dalam hak memilih. Maka dari itu kaum milenial juga masuk daftar dalam pemilih muda karena mereka sudah berusia 17 tahun atau lebih.

Golput dapat disebabkan oleh beberapa aspek teknis, aspek politis dan ideologis, dan aspek identitas seseorang. Bahwa seseorang berperilaku golput dilihat dari aspek teknis karena ada kendala teknis yang dialami pemilih. Hal tersebut menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Sebagai contoh misalnya seseorang memiliki kegiatan lain pada waktu yang bersamaan pada hari pemilihan, sehingga tidak bisa datang ke TPS. Pada aspek politis perilaku golput mempunyai alasan seperti tidak percaya dengan partai, calon/kandidat, atau tidak percaya akan adanya perubahan yang lebih baik. Sedangkan dari aspek identitas seseorang bisa dilihat berdasarkan agama, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lainya. Dari segi agama, seseorang memutuskan untuk golput karena partai yang diharapkan tidak terpilih sebagai calon/kandidat. Misalnya, seseorang yang beragama Kristen cenderung tidak memilih partai yang mengusung Islam seperti PPP atau PKB, sedangkan pada calon atau parpol beraliran nasionalis dinilai kurang representatif untuk mewadahi aspirasi, maka golput akan menjadi pilihan akhir yang diambil.

Komisioner KPU divisi sosialisasi, menyatakan pendidikan pemilih dan pengembangan SDM menyatakan ada beberapa strategi peningkatan sosialisasi dan partisipasi yang dapat dilakukan KPU. Di antaranya adalah dengan melibatkan kelompok-kelompok strategis, seperti pemilih pemula, kaum beragama, perempuan, penyandang disabilitas dan kaum marginal. Mereka dapat menjadi pionier dalam sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih. Menjawab tantangan ini, KPU menyelenggarakan program Relawan Demokrasi yang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah KPU menyelenggarakan lomba desain maskot dan *jingle* untuk pemilu yang akan digunakan dalam media sosialisasi. Diharapkan melalui maskot dan *jingle* masyarakat makin paham pemilu 2024 dan menurunkan tingkat golput. Desain maskot dan *jingle* yang terpilih telah diumumkan pada acara *launching* maskot dan *jingle* pemilu 2024. Acara *launching* diliput oleh berbagai media massa dan diunggah ke media online melalui *Youtube*. Penggunaan *Youtube* menunjukkan KPU juga ingin meraih segmen pemilih muda/pemilih pemula.

Upaya berikutnya dari KPU adalah merekrut agen sosialisasi yang bertugas membantu sosialisasi pemilu 2024 ke daerah-daerah dan seluruh pelosok Indonesia. Selain sebagai mitra KPU, agen sosialisasi perlu menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan hak pilih serta tata cara memilih. KPU daerah mengadakan acara sosialisasi dengan berbagai *event*, seperti menggelar gowes bersama. Kampanye menggunakan sepeda ini juga dilaksanakan di beberapa daerah lainnya, berguna untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput.

Selain itu, untuk menurunkan tingkat golput diantara pemilih pemula, KPU memasang poster dan spanduk di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Pemasangan poster dan spanduk ini tidak hanya di pusat tetapi merata hingga ke daerah. Minimnya partisipasi pemilih pemula menjadi hal penting yang perlu dicarikan solusi, mengingat pemilih pemula berpotensi untuk golput. Para pemilih pemula diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya, mereka juga dapat

berperan, dalam sejumlah kegiatan untuk mendukung sosialisasi pemilu ini ketengah masyarakat, seperti pemasangan stiker pemilu, dan ajakan memilih di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain stiker, KPU juga membagikan helm, rompi, dan masker kepada pengguna motor, dan penjual koran di jalan raya. Juga dengan menerbitkan buku modul yang dapat diunduh dari website KPU. Buku modul ini difokuskan untuk pemilih pemula.

Upaya lain untuk menghindari Golput adalah dengan menambah jumlah TPS untuk pemilu 2024. Alasan tingginya golput atau rendahnya tingkat kehadiran pemilih ke TPS karena TPS terlalu jauh dari warga. Dengan penambahan TPS diharapkan dapat menekan angka golput.

Upaya terakhir adalah meluncurkan iklan pemilu baik melalui TV maupun media massa lainnya. Target sasaran iklan ini adalah tiga kelompok, yaitu golongan muda atau pemilih pemula, perempuan, dan golongan terpinggir atau kaum disabilitas. Isi materi dalam iklan pemilu tersebut ada dua hal, yaitu bagaimana mengajak pemilih cerdas dan aktif, dan teknis yaitu bagaimana cara memilih sehingga suara dapat dianggap sah. Untuk pemilu 2024, iklan pemilu tetap dijalankan melalui berbagai TV dan radio swasta di Indonesia, ditambah dengan sosialisasi pemilu melalui Talk Show yang dilakukan oleh anggota KPU.

SIMPULAN

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Sejumlah survey menunjukkan generasi muda menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Pemilih muda antara 17-22 tahun atau bisa juga pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 yang lalu diprediksi jumlah pemilih muda mengalami peningkatan. KPU telah melakukan beberapa upaya untuk mensosialisasikan pemilu 2024 kepada masyarakat, antara lain melalui perekrutan relawan demokrasi hingga ke pelosok-pelosok yang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Upaya kedua dalam sosialisasi pemilu 2024, KPU menyelenggarakan lomba desain maskot dan *jingle* untuk pemilu yang akan digunakan dalam media sosialisasi. Upaya berikutnya dari KPU adalah merekrut agen sosialisasi yang bertugas membantu sosialisasi pemilu 2024 ke daerah-daerah dan seluruh pelosok Indonesia. Selain sebagai mitra KPU, agen sosialisasi perlu menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan hak pilih serta tata cara memilih. KPU juga mengadakan *event* bersama agen sosialisasi untuk menarik minat masyarakat terhadap pemilu. Selain itu, untuk menurunkan tingkat golput diantara pemilih pemula, KPU memasang poster dan spanduk di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Upaya lainnya adalah dengan menambah jumlah TPS untuk pemilu 2024. Upaya terakhir adalah meluncurkan iklan pemilu baik melalui TV maupun media massa lainnya. Untuk pemilu 2024, iklan pemilu tetap dijalankan melalui berbagai TV dan radio swasta di Indonesia, ditambah dengan sosialisasi pemilu melalui Talk Show yang dilakukan oleh anggota KPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhani, M. L. M. A. M., Jendrius, J., & Syahrizal, S. (2019). Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2021>
- Cahyani, C. H. (2019). SOSIALISASI POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 32.
- Cereswell. (2005). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.

- Fadilah, A., Faisal, M. E., Mega, R., Natadikara, J., Maharani, S. J., Faisal, M. E., Jl, A., Raya, P., & Cianjur, K. (2024). *Peranan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Dikaji Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum untuk berdemokrasi yang benar . Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara merupakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat mensosialisasikan tata cara atau sistem.* 2(2), 306–319.
- Fathurokhman, B. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i1.68>
- Harahap, H. I., Irmayani, T., Lubis, F. H., Politik, D. I., Ilmu, F., Politik, I., & Utara, U. S. (2019). *JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Model Pokok Bahasan Inti Deradikalisasi untuk Anak-anak Terpapar Radikalisme The Core Model of Deradicalization for Children Absorbs Radical Ideology.* 11(2), 374–381.
- Harris, M. C. (2014). Civility, religious pluralism, and education. *British Journal of Educational Studies.* <https://doi.org/10.1080/00071005.2014.970795>
- Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 6(1), 15–27.
- Iswardhana, M. R., Zakinah, M., Maharani, G. A., Tayan, W. G., & Nuraini, A. (2023). Kampanye Gunakan Hak Suara dan Jangan Golput pada Pemilu 2024 Untuk Generasi Muda. *PakMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 117–122. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.2014>
- Ivan, J. S., & Prayetno, S. Z. (2017). Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada Proses Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Tahun. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 99–101.
- Jesica, C. N., Sumadinata, R. W. S., & Paskarina, C. (2020). *Effects of Mass Media and Digital Media Internet on Young Voter Participation.* 8(1), 57–67.
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 39–47.
- Noor Maulandari , H.M. Uhaib As'ad, S. (2020). *PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PILKADA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 2020 (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas). 2020.*
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Samidi, R., & Suharno, S. (2018). Konseptualisasi Hak-Hak Politik dalam Sejarah Perodesasi Demokrasi. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1895>
- Silalahi, W. (2022). Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>
- Sitepu. (2012). *Studi Ilmu Politik.* Graha Ilmu.